

# Analisis Kualitas Belanja Daerah

## Abstrak

*Kondisi kemiskinan di Indonesia secara nasional terus menurun, akan tetapi tidak diikuti oleh beberapa provinsi di Indonesia justru meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Mengalokasikan anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat miskin atau yang disebut pro-poor budgeting. Belanja pemerintahan di pusat dan di daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi perlindungan sosial, penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja negara, belanja modal, dan belanja daerah. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Auditor pemerintah juga memberi perhatian lebih pada audit atas belanja karena pada kenyataannya sebagian besar kebocoran APBN terletak pada pelaksanaan belanja.*

Semenjak digulirkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang didengungkan semenjak era reformasi pada tahun 1999 bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi pergeseran yang sangat signifikan dalam hal kewenangan pengaturan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kewenangan yang besar tersebut berupa peningkatan dan keleluasaan dalam memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah menjadi lebih leluasa di dalam mengatur anggaran dan keuangannya sendiri. Pemerintah daerah juga dapat menentukan sendiri pos-pos apa saja yang prioritas dalam membangun daerah. Urusan wajib dan urusan pilihan yang sebelumnya ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat, semenjak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Belanja merupakan bentuk realisasi anggaran dari rencana kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Kegiatan yang ada di pemerintahan baru akan dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai direalisasikan, seperti belanja pegawai, belanja ekonomi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja urusan perlindungan sosial, belanja modal, belanja barang dan jasa. Pemerintah diminta untuk meningkatkan kualitas belanja guna mengejar target untuk pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah khususnya belanja modal harus dioptimalkan karena memiliki dampak ekonomi yang luas terhadap sektor lainnya. Sejumlah strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah diantaranya perencanaan anggaran

yang lebih tepat, melakukan tender lebih awal sehingga pelaksanaan anggaran dapat dijalankan di awal tahun serta meningkatkan realisasi kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Permasalahan belanja di sektor publik adalah efisiensi. Kalau berbicara mengenai efisiensi, maka tolok ukurnya adalah cost and benefit. Selanjutnya penyerapan yang hampir terjadi setiap tahun menumpuk pada akhir tahun. Apabila ini terjadi maka dapat dipastikan bahwa kualitas belanja tidak optimal dan kurang mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi. Kemudian penyerapan anggaran yang kurang optimal dan masih kurang berorientasi kepada output. Dengan penyempurnaan regulasi, diharapkan mampu mengurangi masalah-masalah belanja disektor publik.

Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang saat ini diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Berdasarkan sistem ini, setiap penyusunan anggaran harus disusun atas output yang ingin dicapai. Indikator output ini sangat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas belanja. Oleh karena itu, kualitas output sangat menentukan kualitas belanjanya. Output yang baik akan memberikan outcome (hasil) dan benefit (manfaat) yang baik, sementara output yang buruk akan berakibat pada tidak optimalnya hasil sehingga belanja yang dikeluarkan pun tidak efektif. Selain itu, output yang baik adalah output yang disusun atas dasar analisis kebutuhan. Menurut pendapat penulis, proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah masih terdapat beberapa kelemahan. Seperti yang telah diuraikan di atas, kelemahan tersebut terletak pada dua hal, yaitu ketidakpahaman penyelenggara dalam melakukan proses belanja dan adanya oknum penyelenggara yang secara sengaja melakukan penyelewengan. Dua hal ini akan menyebabkan adanya overspending, underspending, misspending, dan fraud spending. Ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja adalah salah satu konsekuensi penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja.

Salah satu bentuk dan upaya dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya alokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur. Dengan adanya belanja untuk pembangunan infrastruktur, yang kemudian disebut sebagai belanja modal, pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah diharapkan menjadi semakin meningkat. Hal ini karena keluaran dari belanja

modal adalah fasilitas publik yang memberikan kemudahan masyarakat di dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Pembangunan yang pesat pada jalan raya, sekolah, pusat ekonomi masyarakat, irigasi, dan gedung-gedung untuk kegiatan kemasyarakatan pada akhirnya akan menjadi katalisator bagi pembangunan daerah. Belanja modal juga merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program kerja pemerintah sebagai bentuk komitmen pembangunan dalam jangka pendek.

Dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah, pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan belanja modal dengan proporsi yang besar. Hal ini sesuai dengan Laporan Pelaksanaan *Spending Performance* dalam Mendanai Pelayanan Publik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa secara ideal, porsi alokasi belanja modal (belanja infrastruktur) harus lebih tinggi daripada belanja pegawai (belanja tidak langsung) (sumber dari: DJPK). Laporan tersebut juga menyatakan bahwa porsi alokasi belanja modal yang besar tersebut sangat penting guna percepatan dalam terciptanya jenis dan wujud pelayanan publik yang semakin baik di tataran pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

### **Teori Alokasi Anggaran Bland**

Bland (1997) menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor legal. Faktor politik yang dapat mempengaruhi anggaran antara lain adalah jumlah anggota legislatif yang berasal dari partai pengusung pemerintah (koalisi), keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran, survei anggaran pada masyarakat, dan dengar pendapat dari masyarakat. Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi adalah siklus ekonomi, tingkat inflasi, kinerja keuangan pemerintah, tingkat suku bunga, dan kompetisi antar-pemerintah daerah. Adapun faktor sosial yang berpengaruh adalah populasi dan demografi serta profil masyarakat. Sedangkan faktor yang terkait dengan legal adalah mandat atau keharusan dalam mengalokasikan suatu belanja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan teori Bland tersebut karena teori tersebut mampu menjelaskan pengalokasian belanja secara komprehensif dari berbagai faktor. Dengan memandang secara holistik, diharapkan hasil yang diperoleh dari telaah ini dapat menjelaskan alokasi belanja modal secara komprehensif.

Berdasarkan pemaparan tentang teori tersebut dapat disimpulkan juga bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi juga oleh faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor legal.

Belanja modal juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Adapun proksi yang dipilih oleh telaah ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan menjadi salah satu proksi karena kinerja keuangan tahun lalu menggambarkan apa yang telah pemerintah daerah raih sehingga akan menjadi salah satu pedoman dalam menyusun anggaran tahun berikutnya. Adapun tingkat suku bunga tidak dijadikan variabel dalam telaah ini karena jumlah pemerintah daerah yang melakukan utang sangat sedikit bahkan daerah cenderung mereduksi utangnya (DJPK, 2016). Kompetisi antar-pemerintah daerah di Indonesia hampir tidak ada sehingga tidak dijadikan variabel.

Faktor lain yang juga memengaruhi alokasi belanja modal menurut Bland (1997) adalah faktor sosial. Faktor sosial tidak dijadikan variabel di dalam telaah ini mengingat faktor sosial tidak berpengaruh secara langsung terhadap alokasi belanja daerah. Faktor sosial akan sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja pusat yaitu berupa Transfer Ke Daerah yang sangat memperhitungkan kondisi sosial dan demografis. Hal ini karena untuk belanja daerah, alokasi yang terpengaruh faktor legal adalah belanja yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK disalurkan bukan berdasarkan jenis belanja, tetapi berdasarkan fungsi sehingga dapat mencakup belanja modal dan belanja barang dalam satu fungsi.

Jadi, belanja modal seringkali diidentikkan dengan belanja infrastruktur. Hal ini karena belanja modal adalah belanja pemerintah yang digunakan dalam rangka pembangunan berkelanjutan berupa pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam banyak hal, belanja modal seringkali dikaitkan dengan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak lah mengherankan jika belanja modal seringkali disebut sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Investasi sendiri dapat diinterpretasikan dengan macam-macam pengertian sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang melihat investasi pemerintah ini dari konteks dan sisi ekonomi mikro, konteks ekonomi makro, dan ada pula yang melihatnya dari konteks akuntansi.

Subiyanto dan Halim (2008) menyebutkan bahwa dalam konteks akuntansi, investasi dapat dimunculkan dari adanya perbedaan antara *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Investasi dalam pengertian belanja modal adalah *capital expenditure* yang didefinisikan sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal pemerintah

merupakan bentuk investasi pemerintah daerah yang diharapkan memiliki manfaat ekonomi dan manfaat sosial sehingga dalam merumuskan kebijakan (alokasi anggaran) tersebut tidak hanya mempertimbangkan dari sisi ekonomi, melainkan pula dari sisi sosial kemasyarakatan. Meskipun demikian, aspek ekonomi merupakan aspek yang relatif lebih mudah dipertimbangkan dibandingkan aspek sosial (Subiyanto dan Halim, 2008).

### Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.

### Analisis Regresi

Analisis regresi adalah metode untuk mengembangkan sebuah model (persamaan) yang menjelaskan hubungan di antara beberapa variabel. Output dari analisis regresi adalah sebuah persamaan regresi. Pada model regresi variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respons (response) atau biasa juga disebut variabel bergantung (dependent variable) serta variabel explanatory atau biasa juga disebut variabel penduga (predictor variable) atau disebut juga variabel bebas (independent variable).

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Asumsi awal yang dibentuk adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) ini dipengaruhi oleh Belanja fungsi urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan perlindungan sosial.

#### ❖ **Hipotesis**

Alokasi belanja urusan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di wilayah.

❖ **Pengujian hipotesis**

<b>VARIABEL</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>Variabel dependen (Y1-Y3)</b>	Opini BPK (yang mewakili Tingkat Akuntabilitas), Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK), Garis Kemiskinan (GK)
<b>Variabel bebas (X1-X4)</b>	Belanja urusan pendidikan
	Belanja urusan kesehatan
	Belanja urusan sosial
	Belanja urusan ekonomi

**Kemiskinan = f (belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja sosial, belanja ekonomi)**

**A. Hasil Pengolahan Analisis Regresi dengan SPSS**

Variabel Dependen = Opini BPK yang merupakan Faktor Akuntabilitas

Variabel Independen = Belanja Fungsi Ekonomi, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Fungsi Pendidikan, dan Belanja Fungsi Sosial

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
OPINI	3.7100	.61145	538
A01	1.3998E+11	2.04547E+11	538
A02	2.5781E+11	3.57996E+11	538
A07	4.4076E+11	4.51414E+11	538
A08	26240812191	27159910972	538

**Correlations**

		OPINI	A01	A02	A07	A08
Pearson Correlation	OPINI	1.000	.114	.125	.217	.091
	A01	.114	1.000	.807	.728	.760
	A02	.125	.807	1.000	.803	.745
	A07	.217	.728	.803	1.000	.755
	A08	.091	.760	.745	.755	1.000
Sig. (1-tailed)	OPINI	.	.004	.002	.000	.017
	A01	.004	.	.000	.000	.000
	A02	.002	.000	.	.000	.000
	A07	.000	.000	.000	.	.000
	A08	.017	.000	.000	.000	.
N	OPINI	538	538	538	538	538
	A01	538	538	538	538	538
	A02	538	538	538	538	538
	A07	538	538	538	538	538
	A08	538	538	538	538	538

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.248 <sup>a</sup>	.062	.055	.59451	.062	8.758	4	533	.000	1.977

a. Predictors: (Constant), A08, A02, A07, A01

b. Dependent Variable: OPINI

Dari tabel model summary di atas, didapat hasil bahwa variasi seluruh variabel bebas dapat mempengaruhi perubahan variabel terikat sebesar 0,248 alias 24,8%. Sedangkan sisanya 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.382	4	3.095	8.758	.000 <sup>b</sup>
	Residual	188.384	533	.353		
	Total	200.766	537			

a. Dependent Variable: OPINI

b. Predictors: (Constant), A08, A02, A07, A01

Dari Uji ANOVA, ini terlihat bahwa Opini (yang mewakili tingkat akuntabilitas) secara parsial berpengaruh secara signifikan (Sig 0.000), sedangkan pengaruh dengan hasil 8.758 ini merupakan hasil kecocokan model dimana Opini ini memberikan tingkat signifikansi yang tidak begitu tinggi.

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.3444	4.5411	3.7100	.15184	538
Residual	-2.65822	.65562	.00000	.59229	538
Std. Predicted Value	-2.408	5.473	.000	1.000	538
Std. Residual	-4.471	1.103	.000	.996	538

a. Dependent Variable: OPINI

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	3.598	.038		95.613	.000	3.524	3.672						
	A01	4.472E-014	.000	.015	.192	.848	.000	.000	.114	.008	.008	.290	3.451	
	A02	-1.539E-013	.000	-.090	-1.063	.288	.000	.000	.125	-.046	-.045	.245	4.082	
	A07	5.287E-013	.000	.390	5.072	.000	.000	.000	.217	.215	.213	.297	3.364	
	A08	-3.327E-012	.000	-.148	-2.021	.044	.000	.000	.091	-.087	-.085	.329	3.037	

a. Dependent Variable: OPINI

Persamaan Regresi Linier adalah  $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \dots$

Dalam Persamaan Regresi Linier, besaran dan arah pengaruh setiap variabel bebas terdapat pada nilai Beta ( $\beta$ ) > disebut juga koefisien regresi.

Maka didapat,  $Y = 3,598 + 4,472E-104X_1 - 1.539E-013X_2 + 5,287E-013X_3 - 3,327E-012X_4$ .

Maka dapat disimpulkan bahwa Belanja per Fungsi Urusan Ekonomi (A1) dan Belanja per Fungsi Pendidikan (A07) ini memiliki pengaruh yang positif terhadap Variabel Dependen yaitu Opini (yang merupakan tingkat akuntabilitas).

Opini audit merupakan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor atas audit laporan keuangan. Opini menjelaskan mengenai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan yang berdasar pada kriteria tertentu. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Apabila



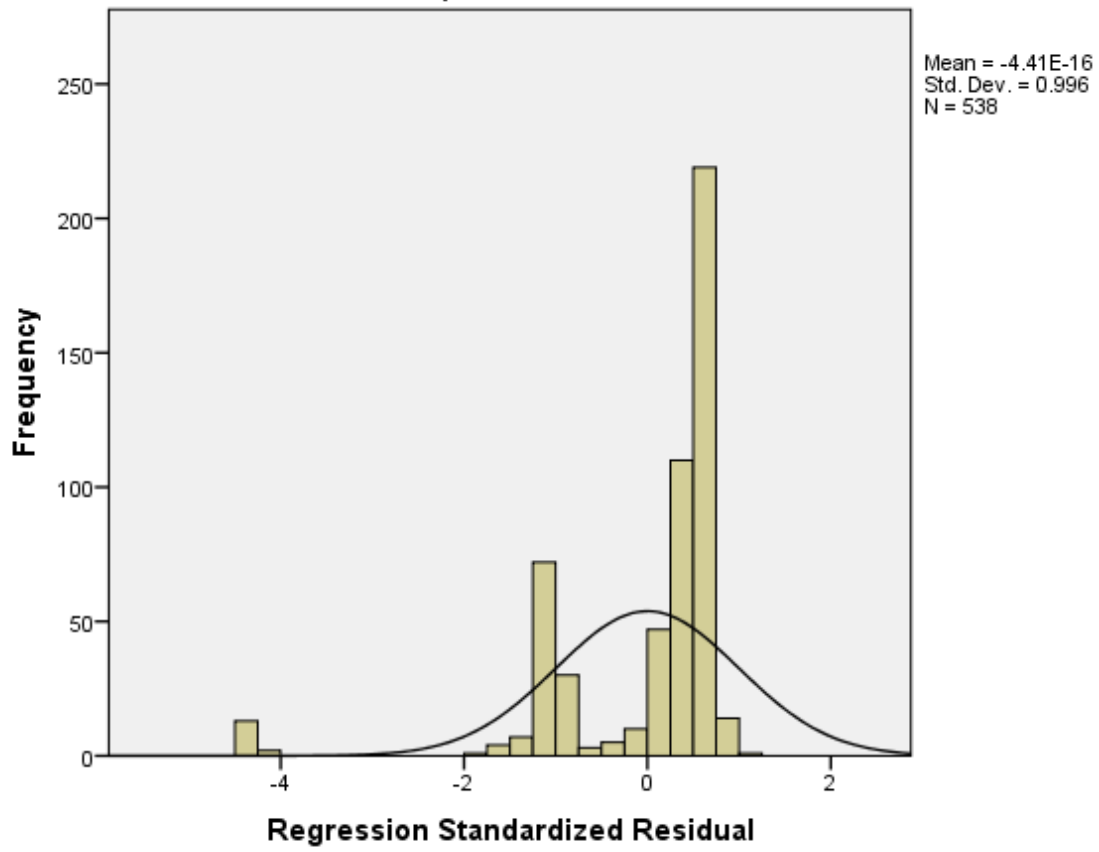
pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Teori keagenan ini menjelaskan hubungan agen dengan principal yang dimana pemerintah selaku agen hendak terus berupaya menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik dan senantiasa memberikan pertanggungjawaban sehingga memperoleh opini audit yang baik. Opini audit pemerintah daerah yang semakin baik akan membuat masyarakat menjadi lebih percaya dengan pemerintah untuk mengelola keuangan pemerintah daerah yang dimana kinerja keuangan ini dapat diukur dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan jumlah transfer pusat maupun provinsi serta pinjaman yang dimiliki pemerintah. Melalui rasio kinerja keuangan tersebut dapat dinilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Secara jelas bahwa implikasi atas pengelolaan keuangan negara dapat mencerminkan kinerja institusi dalam memanfaatkan dana untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena sifatnya adalah unit kerja publik, maka entitas yang menjadi obyek pemeriksaan adalah berkaitan dengan belanja untuk menghasilkan pelayanan dan produk untuk memenuhi kebutuhan publik. Musgrave & Musgrave (1989) mengategorikan kebutuhan publik dalam produk-produk layanan publik antara lain 'public goods, public services, security, education, and health.' Ada fenomena yang menarik untuk dikaji selanjutnya yaitu keterkaitan antara alokasi belanja layanan publik dengan kepekaan tumbuhnya kegiatan produksi dan terpenuhinya layanan publik. Dalam konteks inilah proses manajemen pengawasan dan pemeriksaan atas alokasi belanja diperlukan untuk mendeteksi kebenarannya.

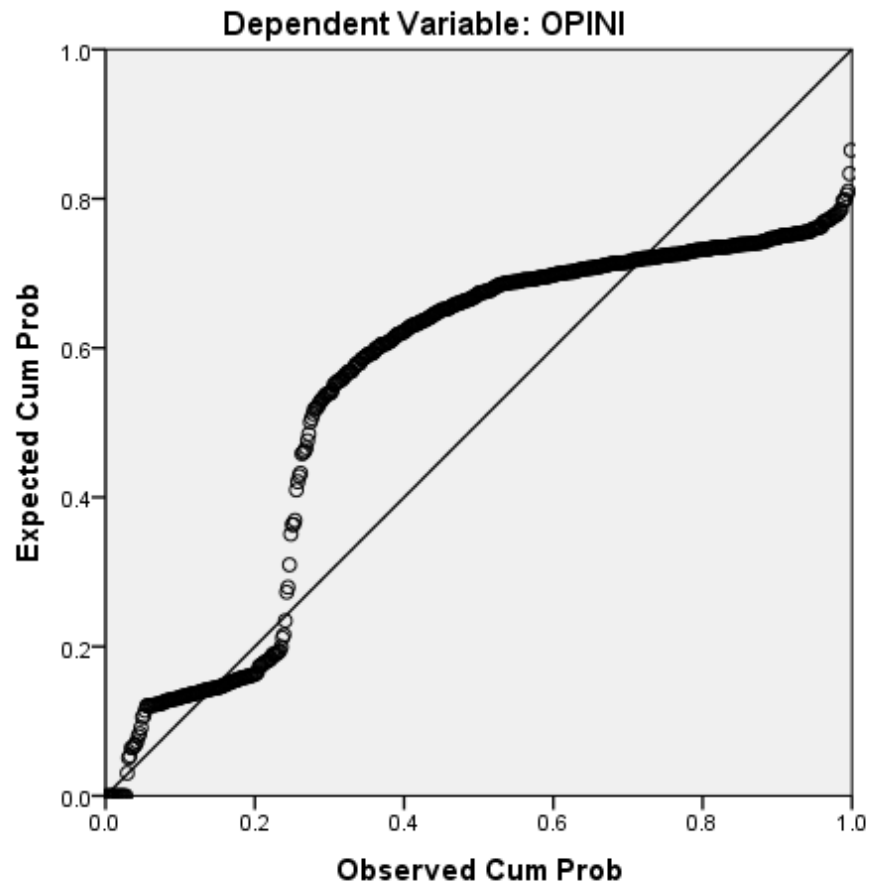
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa kualitas pemerintahan daerah yang diindikasikan oleh kondisi fiskal dan kinerja laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif daerah. Kondisi fiskal daerah yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu tingkat desentralisasi fiskal dan kemandirian fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kemandirian fiskal menjadi salah satu aspek penting dan menentukan dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, pengelolaan belanja daerah khususnya belanja modal perlu ditingkatkan untuk pembangunan. Dari sisi kinerja laporan keuangan, hasil audit BPK, Return on Asset, dan Cash Ratio merupakan faktor yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

# Histogram

Dependent Variable: OPINI



## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan tampilan output chart di atas, dapat dilihat grafik histogram maupun grafik plot. Dimana grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya adalah data berdistribusi normal. Selanjutnya, pada gambar P-Plot terlihat titik-titik relatif mengikuti dan relatif mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### **B. Hasil Pengolahan Analisis Regresi dengan SPSS**

Variabel Dependen = Garis Kemiskinan

Variabel Independen = Belanja Fungsi Ekonomi, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Fungsi Pendidikan, dan Belanja Fungsi Sosial

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
GK	372325.1076	89037.73627	539
A01	1.3979E+11	2.04405E+11	539
A02	2.5746E+11	3.57756E+11	539
A07	4.4008E+11	4.51276E+11	539
A08	26202417567	27149294883	539

**Correlations**

		GK	A01	A02	A07	A08
Pearson Correlation	GK	1.000	.136	.091	.050	.190
	A01	.136	1.000	.807	.728	.760
	A02	.091	.807	1.000	.804	.745
	A07	.050	.728	.804	1.000	.756
	A08	.190	.760	.745	.756	1.000
Sig. (1-tailed)	GK	.	.001	.017	.123	.000
	A01	.001	.	.000	.000	.000
	A02	.017	.000	.	.000	.000
	A07	.123	.000	.000	.	.000
	A08	.000	.000	.000	.000	.
N	GK	539	539	539	539	539
	A01	539	539	539	539	539
	A02	539	539	539	539	539
	A07	539	539	539	539	539
	A08	539	539	539	539	539

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.242 <sup>a</sup>	.059	.052	86706.06735	.059	8.331	4	534	.000	.255

a. Predictors: (Constant), A08, A02, A07, A01

b. Dependent Variable: GK

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.505E+11	4	62632863034	8.331	.000 <sup>b</sup>
	Residual	4.015E+12	534	7517942116		
	Total	4.265E+12	538			

a. Dependent Variable: GK

b. Predictors: (Constant), A08, A02, A07, A01

Dari Uji ANOVA, ini terlihat bahwa Garis Kemiskinan (GK) secara parsial berpengaruh secara signifikan (Sig 0.000), sedangkan pengaruh dengan hasil 8.331 ini merupakan hasil kecocokan model dimana Garis Kemiskinan ini memberikan tingkat signifikansi yang relative tidak begitu tinggi.

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	315737.0313	575899.0625	372325.1076	21579.43104	539
Residual	-184046.8125	476019.1875	.00000	86383.13860	539
Std. Predicted Value	-2.622	9.434	.000	1.000	539
Std. Residual	-2.123	5.490	.000	.996	539

a. Dependent Variable: GK

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	361334.839	5478.644		65.953	.000	350572.501	372097.177						
	A01	3.496E-008	.000	.080	1.029	.304	.000	.000	.136	.044	.043	.290	3.452	
	A02	-8.191E-009	.000	-.033	-.388	.698	.000	.000	.091	-.017	-.016	.245	4.084	
	A07	-4.524E-008	.000	-.229	-2.976	.003	.000	.000	.050	-.128	-.125	.297	3.367	
	A08	1.073E-006	.000	.327	4.471	.000	.000	.000	.190	.190	.188	.329	3.039	

a. Dependent Variable: GK

Persamaan Regresi Linier adalah  $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \dots$

Dalam Persamaan Regresi Linier, besaran dan arah pengaruh setiap variabel bebas terdapat pada nilai Beta ( $\beta$ ) > disebut juga koefisien regresi.

Maka didapat,  $Y = 361334,839 + 3,496E-008X_1 - 8,191E-009X_2 - 4,524E-008X_3 + 1,073E-006X_4$ .

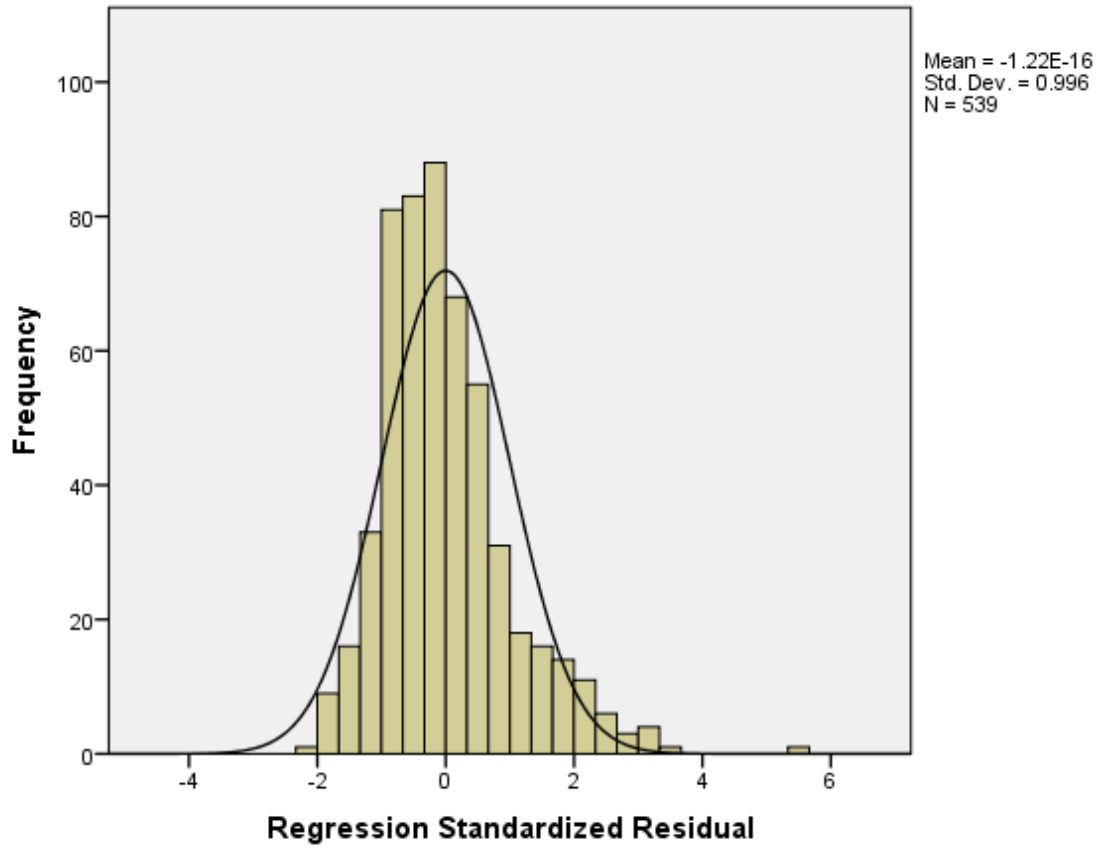
Maka dapat disimpulkan bahwa Belanja per Fungsi Urusan Ekonomi (A1) dan Belanja per Fungsi Urusan Perlindungan Sosial (A08) ini memiliki pengaruh yang positif terhadap Variabel Dependen yaitu Garis Kemiskinan.

Dampak belanja pendidikan terhadap kemiskinan memerlukan waktu dalam jangka panjang dan penganggaran sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja pegawai dan tenaga pendidik. Belanja kesehatan, perlindungan sosial dan tingkat pertumbuhan ekonomi terbukti dapat menurunkan kemiskinan karena memiliki dampak yang lebih langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Belanja fungsi ekonomi dan belanja bantuan sosial merupakan wujud peran pemerintah dalam perekonomian dalam bentuk kebijakan fiskal. Belanja ekonomi dan modal yang diwujudkan dalam pembelian aset tahan lama infrastruktur jalan, jaringan irigasi, serta bangunan lainnya mampu menjadi sarana untuk meningkatkan aktifitas ekonomi di daerah yang bersangkutan. Demikian pula, belanja bantuan sosial yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk uang maupun barang mampu menambah keberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil membuktikan bahwa sebagai instrumen kebijakan fiskal, belanja modal dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang berarti dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu komponen belanja tidak langsung pemerintah berupa uang, barang atau jasa, yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataannya, belanja bantuan sosial hanya memiliki porsi yang sangat kecil dari total belanja dan diperuntukkan. Bahkan, ada beberapa daerah yang tidak menyediakan anggaran belanja sosial pada tahun-tahun anggaran tertentu. Kecilnya jumlah serta porsinya dalam APBD provinsi, menyebabkan peran belanja ini belum terlihat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

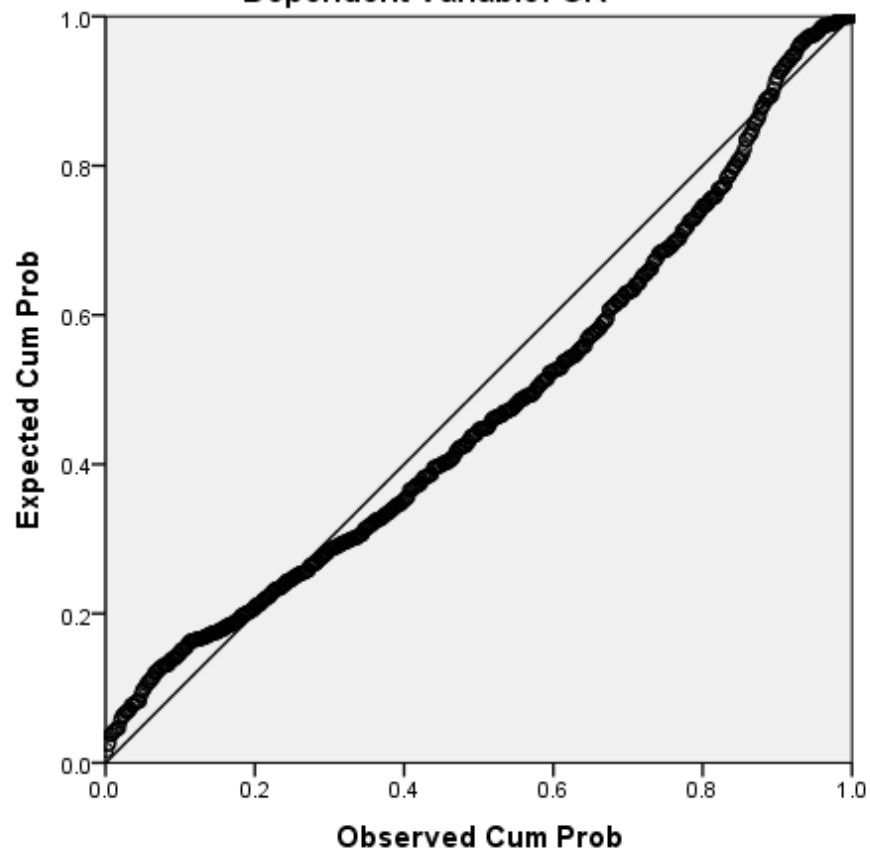
# Histogram

Dependent Variable: GK



### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: GK



Berdasarkan tampilan output chart di atas, dapat dilihat grafik histogram maupun grafik plot. Dimana grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya adalah data berdistribusi normal. Selanjutnya, pada gambar P-Plot terlihat titik-titik relatif mengikuti dan relatif mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.



### C. Hasil Pengolahan Analisis Regresi dengan SPSS

Variabel Dependen = Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK)

Variabel Independen = Belanja Fungsi Ekonomi, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Fungsi Pendidikan, dan Belanja Fungsi Sosial

#### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
IKK	2.3098	2.14752	539
A01	1.3979E+11	2.04405E+11	539
A02	2.5746E+11	3.57756E+11	539
A07	4.4008E+11	4.51276E+11	539
A08	26202417567	27149294883	539

#### Correlations

		IKK	A01	A02	A07	A08
Pearson Correlation	IKK	1.000	-.026	-.105	-.182	-.010
	A01	-.026	1.000	.807	.728	.760
	A02	-.105	.807	1.000	.804	.745
	A07	-.182	.728	.804	1.000	.756
	A08	-.010	.760	.745	.756	1.000
Sig. (1-tailed)	IKK	.	.270	.007	.000	.405
	A01	.270	.	.000	.000	.000
	A02	.007	.000	.	.000	.000
	A07	.000	.000	.000	.	.000
	A08	.405	.000	.000	.000	.
N	IKK	539	539	539	539	539
	A01	539	539	539	539	539
	A02	539	539	539	539	539
	A07	539	539	539	539	539
	A08	539	539	539	539	539

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.278 <sup>a</sup>	.077	.070	2.07062	.077	11.176	4	534	.000	1.793

a. Predictors: (Constant), A08, A02, A07, A01

b. Dependent Variable: IKK

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	191.671	4	47.918	11.176	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2289.510	534	4.287		
	Total	2481.181	538			

a. Dependent Variable: IKK

b. Predictors: (Constant), A08, A02, A07, A01

Dari Uji ANOVA di atas, ini terlihat bahwa Indeks Garis Kemiskinan (IKK) secara parsial berpengaruh secara signifikan (Sig 0.000), sedangkan pengaruh dengan hasil 11.176 ini merupakan hasil kecocokan model dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) ini memberikan tingkat signifikansi yang relatif cukup tinggi.

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-.9484	4.9690	2.3098	.59688	539
Residual	-3.21127	11.81686	.00000	2.06291	539
Std. Predicted Value	-5.459	4.455	.000	1.000	539
Std. Residual	-1.551	5.707	.000	.996	539

a. Dependent Variable: IKK

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	2.568	.131		19.628	.000	2.311	2.825						
	A01	1.586E-012	.000	.151	1.955	.051	.000	.000	-.026	.084	.081	.290	3.452	
	A02	-4.505E-013	.000	-.075	-.893	.372	.000	.000	-.105	-.039	-.037	.245	4.084	
	A07	-1.987E-012	.000	-.417	-5.474	.000	.000	.000	-.182	-.230	-.228	.297	3.367	
	A08	1.947E-011	.000	.246	3.397	.001	.000	.000	-.010	.145	.141	.329	3.039	

a. Dependent Variable: IKK

Persamaan Regresi Linier adalah  $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \dots$

Dalam Persamaan Regresi Linier, besaran dan arah pengaruh setiap variabel bebas terdapat pada nilai Beta ( $\beta$ ) > disebut juga koefisien regresi.

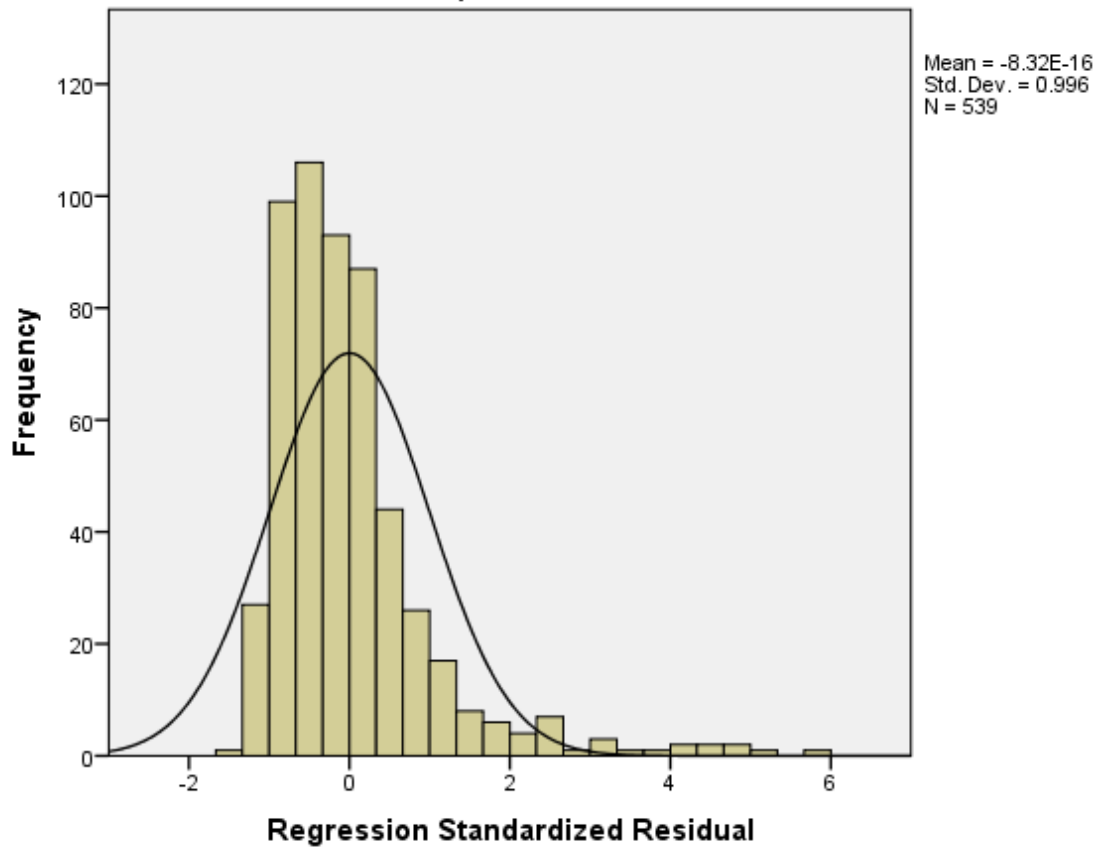
Maka didapat,  $Y = 2,568 + 1,586E-012X_1 - 4,505E-013X_2 - 1,987E-012X_3 + 1,947E-011X_4$ .

Maka dapat disimpulkan bahwa Belanja per Fungsi Urusan Ekonomi (A1) dan Belanja per Fungsi Urusan Perlindungan Sosial (A08) ini memiliki pengaruh yang positif terhadap Variabel Dependen yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK).

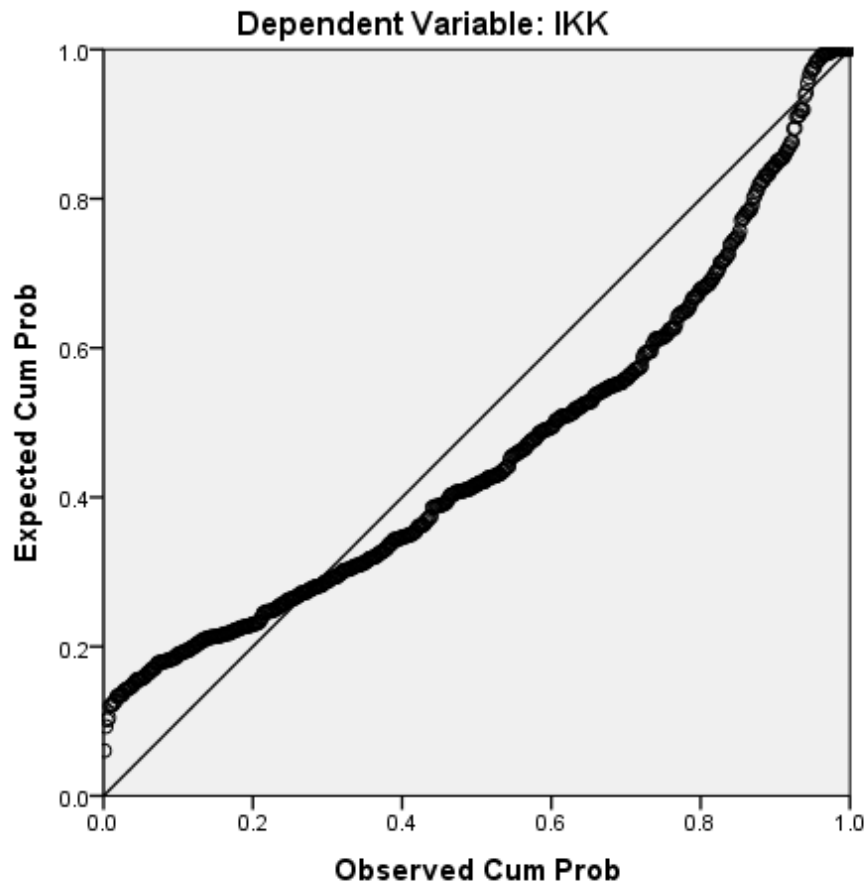
Menurut World Bank (2007) ada tiga ciri utama dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, jumlah rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan banyak. Sehingga, meskipun tidak tergolong miskin, tetapi mereka rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan dan dianggap kurang menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Contohnya adalah terdapat masyarakat yang tidak tergolong miskin dari sisi pendapatan, tetapi dapat dikategorikan miskin atas kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Terakhir, akibat dari luas dan beragamnya Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendasar dan penting dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi yang terjadi di Negara sedang berkembang khususnya di Indonesia. Ditengah kepadatan penduduk di Indonesia tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia masih tergolong tinggi baik di perkotaan maupun pedesaan. Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, maupun struktural. Pandangan ini memperlihatkan luasnya cakupan tentang dimensi kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks dan bersifat multidimensional, mendorong berbagai upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

# Histogram

Dependent Variable: IKK



## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan tampilan output chart di atas, dapat dilihat grafik histogram maupun grafik plot. Dimana grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya adalah data berdistribusi normal. Selanjutnya, pada gambar P-Plot terlihat titik-titik relatif mengikuti dan relatif mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Rekomendasi

Pemerintah agar memprioritaskan untuk meningkatkan belanja per kapita untuk urusan ekonomi, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan karena berperan dalam mengurangi persentase penduduk miskin dan mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan. Karena pemerintah adalah organisasi yang bergerak, pemerintah harus senantiasa beradaptasi dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan kesehatan, pendidikan. Namun dengan perencanaan dan belanja yang baik, lingkungan

itu dapat dikendalikan. Setiap perubahan sistem memerlukan sumber daya yang besar, sikap terbuka, dan profesionalisme. Ketiga hal ini memerlukan usaha yang massive dari setiap lini pemerintah. Namun, dari hal-hal kecil pun bisa kita lakukan untuk memperbaiki proses belanja pemerintah yang saat ini berada dalam tahap transisi sistem. Keempat poin di atas adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan saat ini. Pengendalian belanja harus kita lakukan karena pada dasarnya uang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah uang rakyat.